



Mewujudkan Perekonomian Perempuan: Studi Kualitatif Efektivitas Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Bagi UMKM Jepara

Frenaldo Zain Rahmandani¹, Bonnix Hedy Maulana², Sukma Wijayanti³

^{1,2,3}*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Pendidikan dan Hukum*

Universitas Muhammadiyah Kudus

Corresponding Author email: frenaldozainrahmandani7@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the SPP Program in supporting the development of women's MSMEs in Mayong District. The research uses a qualitative approach with a phenomenological method through in-depth interviews, observations, and documentation of women entrepreneurs, UPK managers, SPP cadres, and village officials. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and interactive conclusion drawing with triangulation of sources and methods to ensure the validity of the findings. The results show that the program's SPP effectiveness is reflected in its socialization mechanisms, loan application and verification processes, easy requirements, village-based fund disbursement, and selection and monitoring systems accompanied by institutional assistance. This program has been proven to increase access to capital, strengthen business capacity, and encourage the empowerment and economic independence of women. Overall, SPP contributes positively to business stability and the strengthening of women's economic role at the village level.

Keywords: Women Empowerment, Program Effectiveness, SPP, MSMEs, PNPM-Mandiri.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program SPP dalam mendukung perkembangan UMKM perempuan di Kecamatan Mayong. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha perempuan, pengelola UPK, kader SPP, dan aparatur desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif dengan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program SPP tercermin dalam mekanisme sosialisasi, pengajuan dan verifikasi pinjaman, kemudahan persyaratan, pencairan dana berbasis desa, serta sistem seleksi dan pengawasan yang disertai pendampingan kelembagaan. Program ini terbukti meningkatkan akses permodalan, memperkuat kapasitas usaha, serta mendorong pemberdayaan dan kemandirian ekonomi perempuan. Secara keseluruhan, SPP berkontribusi positif terhadap stabilitas usaha dan penguatan peran ekonomi perempuan di tingkat desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan perempuan, efektivitas program, SPP, UMKM, PNPM Mandiri.

1. PENDAHULUAN

Kemandirian ekonomi perempuan bukan hanya soal peningkatan pendapatan, melainkan soal transformasi posisi tawar mereka dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dukungan modal kerja melalui lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, terbukti berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha mikro yang dikelola oleh perempuan (Mishra et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang sensitif terhadap keadilan gender adalah prasyarat mutlak bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, apabila diselaraskan antara ekonomi dan keadilan gender, isu pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pembangunan menjadi sangat mendesak untuk kembali dibahas. Perempuan seringkali menghadapi hambatan ganda dalam akses ekonomi, baik secara struktural maupun kultural. Namun, Desiyani & Rahmawati (2024) menegaskan bahwa akses perempuan terhadap pembiayaan mikro memiliki *multiplier effect* yang sangat besar. Pendapatan yang dikelola oleh perempuan cenderung dialokasikan kembali untuk kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, yang secara otomatis meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara agregat.

Keberhasilan Muhammad Yunus melalui Grameen Bank telah mencatatkan sejarah sebagai solusi mutakhir dalam mengatasi sindrom kemiskinan di berbagai negara (Yunus, 2008). Melalui lembaga keuangan mikro ini, Yunus membuktikan kemampuan sistem kredit tanpa agunan yang berhasil memberdayakan sekitar enam juta wanita miskin dan menyalurkan dana lebih dari \$5,1 miliar kepada 5,3 juta nasabah (Nurhayati, 2016). Inovasi ini tidak hanya berfokus pada sektor perbankan, tetapi juga merambah ke sektor teknologi dan sosial seperti Grameenphone dan The Village Phone yang melayani ratusan ribu warga desa. Atas dedikasinya dalam menciptakan perubahan ekonomi yang inklusif dan radikal, ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006, yang semakin mengukuhkan konsep social entrepreneurship sebagai model bisnis masa depan yang manusiawi.

Salah satu intervensi strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong ekonomi perempuan di pedesaan adalah Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Program ini merupakan bagian integral dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang didesain untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan di tingkat desa (Sinollah, 2019). Melalui dana bergulir, SPP memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok perempuan untuk mengakses modal usaha tanpa beban agunan yang memberatkan.

Namun, efektivitas program ini tidak terjadi secara otomatis. Keberhasilan SPP sangat bergantung pada variabel-variabel operasional seperti kualitas pendampingan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), kedisiplinan anggota dalam mengelola perputaran dana, serta ketatnya mekanisme pengawasan internal (Damayanti et al., 2023). Tanpa adanya sistem kontrol yang kuat, dana bergulir tersebut berisiko mengalami kemacetan yang dapat mengancam keberlangsungan program secara keseluruhan.

Salah satu keunikan dari Program SPP yang membedakannya dengan skema kredit lainnya adalah ketergantungannya pada modal sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan SPP sangat ditentukan oleh keberadaan sistem sosial berbasis kepercayaan (*trust-based lending*). Kepercayaan antar-anggota kelompok membangun solidaritas dan tanggung jawab kolektif (*joint liability*), di mana anggota kelompok saling mengawasi satu sama lain (Ulya et al., 2025). Sebaliknya, ketika modal sosial ini melemah dan tidak dibarengi dengan

pelatihan kewirausahaan yang memadai, program cenderung stagnan. Lemahnya pengawasan internal dan minimnya pemahaman mengenai manajemen risiko menjadi faktor utama penghambat perkembangan usaha (Jasmi & Hassan, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa penyediaan modal finansial haruslah berjalan beriringan dengan penguatan modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*).

Di Kecamatan Mayong, Program SPP dikelola oleh UPK BKAD Mayong sebagai lembaga pengelola dana bergulir eks-PNPM Mandiri. Program ini masih aktif berjalan meskipun PNPM secara nasional telah bertransisi ke skema Dana Desa. Pada tahun 2025, tercatat terdapat 292 kelompok dengan 3.178 anggota penerima manfaat yang tersebar di 18 desa (lihat data sekunder UPK BKAD Mayong, 2025). Namun demikian, terjadi penurunan jumlah kelompok aktif dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun dari sisi keuangan lembaga menunjukkan peningkatan aset dan surplus operasional

Lebih lanjut, terdapat lonjakan *idle money* (dana menganggur) yang mencapai angka sangat tinggi. Penumpukan dana yang tidak tersalurkan ini menandakan adanya kemacetan dalam fungsi intermediasi lembaga (Jasmi & Hassan, 2024). Dana yang seharusnya berputar di masyarakat untuk menggerakkan UMKM justru tersendat di rekening lembaga. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan (*gap*) antara tujuan ideal pemberdayaan ekonomi perempuan dengan realitas implementasi di lapangan. Apakah penurunan partisipasi ini disebabkan oleh kejenuhan pasar, persyaratan yang mulai dianggap memberatkan, atau melemahnya fungsi pendampingan dari kader dan UPK?

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pengelola dan kader SPP, ditemukan bahwa beberapa kelompok tidak melanjutkan pinjaman karena usaha yang dijalankan memiliki jenis yang serupa dan menghadapi persaingan harga di tingkat lokal. Salah satu kader SPP menyatakan banyak yang jualan jenisnya hampir sama dan pasarnya tidak berkembang sehingga mereka jadi ragu untuk melanjutkan pinjaman. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya indikasi kejenuhan usaha mikro berbasis konsumsi lokal. Selain faktor kejenuhan pasar, beberapa informan juga menyebutkan bahwa sebagian anggota merasa siklus pinjaman tidak lagi memberikan peningkatan keuntungan yang signifikan dibanding periode awal keikutsertaan mereka dalam program.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji tiga isu utama: 1) Alasan terjadinya penurunan jumlah kelompok aktif dan anggota SPP di Kecamatan Mayong meskipun kinerja keuangan UPK menunjukkan tren positif? 2) Kejenuhan pasar yang memengaruhi penurunan partisipasi kelompok? 3) Kontribusi dana SPP terhadap ekonomi perempuan pasca-transisi PNPM Mandiri menuju skema Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman langsung pelaku usaha, kader, dan pengelola UPK dalam menjelaskan fenomena tersebut. Analisis tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga pada dinamika sosial, keberlanjutan usaha, dan efektivitas pendampingan dalam menjaga keberlanjutan dana bergulir.

Kajian ini menjadi penting karena dilakukan dalam konteks pergeseran kebijakan pemberdayaan masyarakat pasca-pembubaran PNPM. Secara kebijakan, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi berbasis gender yang tidak hanya menekankan akses kredit, tetapi juga diversifikasi usaha dan penguatan kapasitas pasar perempuan pelaku UMKM di wilayah Jepara.

2. TINJAUAN LITERATUR

Keefektifan Program

Keefektifan secara konseptual dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara tepat (Rangga, 2023;Sinollah, 2019). Dalam perspektif manajerial, efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian hasil akhir, tetapi juga dari kesesuaian proses pelaksanaan dengan standar, waktu, serta kualitas yang direncanakan. Semakin tinggi tingkat ketercapaian tujuan program, maka semakin efektif program tersebut dijalankan (Rangga, 2023;Sinollah, 2019).

Dalam konteks organisasi dan kelompok, efektivitas mencerminkan kemampuan kolektif anggota dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama (Robbins & Judge, 2017). Keberhasilan kelompok sangat dipengaruhi oleh perilaku individu, koordinasi internal, serta dukungan sistem kelembagaan yang menaunginya. Oleh karena itu, efektivitas program pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta partisipasi aktif penerima manfaat (Rangga, 2023).

Secara teoritis, efektivitas implementasi program juga dipengaruhi oleh kualitas desain kebijakan dan konsistensi pelaksanaan di tingkat lapangan. Durlak & DuPre (2008) menegaskan bahwa keberhasilan program sosial sangat ditentukan oleh *fidelity of implementation*, kapasitas organisasi, serta dukungan sistem monitoring. Dalam konteks lembaga keuangan mikro, efektivitas tidak hanya dilihat dari pencapaian target finansial, tetapi juga dari keseimbangan antara keberlanjutan keuangan dan dampak sosial. Dengan demikian, pengukuran efektivitas program simpan pinjam perempuan harus mencakup dimensi finansial dan sosial secara simultan.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi dalam kerangka PNPM Mandiri Perdesaan yang dirancang untuk memperluas akses permodalan bagi perempuan, khususnya dari rumah tangga miskin. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kredit bergulir, tetapi juga sebagai sarana penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis gender (Siregar, 2025). Tujuan utama program SPP meliputi peningkatan akses pembiayaan usaha, penguatan kelembagaan simpan pinjam perempuan, serta peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga. Melalui pendekatan berbasis kelompok dan kepercayaan, SPP diharapkan mampu mendorong disiplin keuangan, solidaritas sosial, serta keberlanjutan dana bergulir di tingkat lokal (Sinollah, 2019).

Literatur internasional menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berbasis kelompok efektif dalam meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta memperkuat posisi tawar mereka dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian eksperimental lintas negara menunjukkan bahwa akses kredit mikro dapat meningkatkan modal kerja dan stabilitas usaha, meskipun dampaknya terhadap kemiskinan bersifat gradual dan kontekstual (Banerjee et al., 2015). Dalam konteks Kecamatan Mayong, implementasi Program SPP merefleksikan dimensi konseptual tersebut secara konkret. SPP dikelola oleh UPK BKAD Mayong sebagai lembaga pengelola dana bergulir eks-PNPM yang tetap beroperasi pasca-transisi kebijakan nasional.

Secara finansial, lembaga menunjukkan tren peningkatan aset dan surplus operasional (Laporan UPK BKAD Mayong, 2025), yang mencerminkan aspek keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*). Namun, di sisi lain, terjadi penurunan jumlah kelompok aktif dan peningkatan dana menganggur (*idle money*), yang mengindikasikan tantangan dalam dimensi dampak sosial dan perluasan partisipasi perempuan. Temuan tersebut menegaskan bahwa pengukuran efektivitas SPP di Mayong tidak dapat hanya dilihat dari indikator keuangan, tetapi harus dianalisis melalui keseimbangan antara keberlanjutan dana bergulir dan keberlanjutan partisipasi sosial kelompok perempuan sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, efektivitas program dalam konteks lokal tidak hanya ditentukan oleh stabilitas keuangan lembaga, tetapi juga oleh kemampuannya mempertahankan inklusi dan dinamika sosial kelompok perempuan secara berkelanjutan.

PNPM Mandiri sebagai Kerangka Pemberdayaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan kebijakan nasional yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Program ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, dengan menekankan partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Mustanir & Faried, 2023).

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community-driven development* (CDD) yang menekankan desentralisasi pengambilan keputusan kepada komunitas lokal. Studi empiris menunjukkan bahwa model CDD efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan akses kelompok miskin terhadap sumber daya ekonomi apabila didukung oleh tata kelola yang transparan dan sistem monitoring yang kuat.

Dalam kerangka PNPM Mandiri, Program SPP menjadi salah satu instrumen strategis yang secara khusus menargetkan pemberdayaan perempuan melalui akses permodalan dan penguatan peran ekonomi di tingkat desa. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, tata kelola kelembagaan, serta efektivitas mekanisme pengawasan (Herdiana, 2022). Dalam konteks Kecamatan Mayong, keberlanjutan Program SPP mencerminkan transformasi kelembagaan pasca-berakhirnya PNPM Mandiri secara nasional. UPK BKAD Mayong tetap menjalankan fungsi intermediasi dana bergulir dengan mempertahankan prinsip partisipatif yang menjadi ciri pendekatan *community-driven development* (CDD). Proses pengajuan pinjaman dilakukan melalui musyawarah kelompok di tingkat desa, verifikasi berjenjang, serta pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan kader dan aparatur desa. Namun demikian, dinamika terkini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi aktif kelompok perempuan, yang terlihat dari penurunan jumlah kelompok aktif dan meningkatnya dana menganggur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan kelembagaan eks-PNPM tidak hanya ditentukan oleh stabilitas administratif, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi lokal.

Praktik Microfinance Internasional

Model *microfinance* yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus melalui *Grameen Bank* menjadi rujukan utama dalam pengembangan program simpan pinjam berbasis pemberdayaan perempuan. Prinsip utama model ini meliputi pinjaman tanpa agunan, pendekatan berbasis

kelompok (*group lending*), dan fokus pada perempuan sebagai agen utama pengentasan kemiskinan. Studi empiris menunjukkan bahwa mekanisme *joint liability* dan *peer monitoring* mampu menekan risiko gagal bayar dan meningkatkan keuangan kelompok (Ghatak & Guinnane, 1999).

Studi mutakhir menunjukkan bahwa model *microfinance* berbasis Yunus tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan modal usaha, pendapatan, serta kapasitas manajerial usaha mikro apabila disertai dengan pendampingan dan tata kelola yang baik (Pattnaik et al., 2024). Namun demikian, literatur terbaru juga menyoroti adanya risiko *mission drift*, yaitu kecenderungan lembaga keuangan mikro untuk lebih fokus pada keberlanjutan finansial dibandingkan perluasan jangkauan kelompok miskin.

Selain itu, tekanan sosial dalam skema tanggung jawab bersama dapat menimbulkan konsekuensi psikologis apabila tidak diimbangi dengan sistem pendampingan dan literasi keuangan yang memadai (Dachi & Kasztelnik, 2024). Oleh karena itu, penguatan monitoring, literasi keuangan, dan pendampingan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan program simpan pinjam berbasis kelompok.

3. METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dalam mendorong perkembangan usaha mikro perempuan di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi program, mekanisme pengelolaan dana bergulir, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan fokus pada tiga isu utama yaitu penyebab penurunan jumlah kelompok aktif dan anggota SPP meskipun kinerja keuangan UPK menunjukkan tren positif, indikasi kejenuhan pasar (*market saturation*) dalam pembiayaan mikro perempuan, dan keberlanjutan dana bergulir SPP pasca-transisi PNPM Mandiri menuju skema Dana Desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas program secara umum, tetapi secara spesifik menganalisis kesenjangan antara keberlanjutan finansial lembaga dan keberlanjutan partisipasi sosial kelompok perempuan.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi pelaku usaha, kader SPP, serta pengelola UPK dalam menjelaskan fenomena tersebut. Studi ini menggali bagaimana dinamika sosial, kondisi pasar lokal, serta mekanisme pendampingan memengaruhi keberlanjutan kelompok dan partisipasi anggota. Melalui wawancara mendalam dan analisis dokumentasi, penelitian ini berupaya menjelaskan secara kontekstual faktor-faktor yang tidak dapat diungkap hanya melalui data kuantitatif laporan keuangan.

Kecamatan Mayong dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kelompok SPP yang relatif besar, yaitu sebanyak 292 kelompok dengan 3.178 anggota yang tersebar di 18 desa (Laporan UPK BKAD Mayong, 2025). Selain itu, wilayah ini menunjukkan fenomena yang kontradiktif antara peningkatan aset dan surplus operasional dengan penurunan jumlah kelompok aktif serta meningkatnya dana menganggur (*idle money*). Pemilihan lokasi secara purposif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh konteks empiris yang kaya informasi sehingga mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika implementasi program pemberdayaan berbasis komunitas.

Proses Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk menggali pengalaman hidup (*lived experiences*) para pelaku usaha perempuan dan pengelola program dalam konteks implementasi SPP. Menurut Maulana et al. (2022), penelitian kualitatif fenomenologi sangat relevan digunakan dalam kajian akuntansi dan program sosial karena memandang praktik akuntansi sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks, pengalaman, dan interaksi sosial para pelaku. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang dibangun individu terhadap realitas sosial yang mereka alami secara langsung. Oleh karena itu, metode ini dinilai tepat untuk menganalisis efektivitas program SPP yang tidak hanya diukur secara administratif, tetapi juga melalui pengalaman nyata pelaku usaha perempuan. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang dibangun individu terhadap realitas sosial yang mereka alami secara langsung. Oleh karena itu, metode ini dinilai tepat untuk menganalisis efektivitas Program SPP dalam konteks spesifik yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, yaitu menjelaskan penyebab penurunan jumlah kelompok aktif, mengidentifikasi indikasi kejenuhan pasar (*market saturation*) dalam usaha mikro perempuan, serta memahami bagaimana dana bergulir tetap bertahan secara kelembagaan meskipun partisipasi sosial mengalami penurunan. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas dari sisi administratif dan laporan keuangan, tetapi juga menggali pengalaman subjektif pelaku usaha dan pengelola dalam menjelaskan dinamika keberlanjutan finansial dan keberlanjutan partisipasi kelompok perempuan.

Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi dan penentuan narasumber yang terlibat secara langsung dalam Program SPP. Narasumber terdiri atas pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK), kader pendamping SPP, pelaku usaha perempuan penerima dana, serta aparatur desa yang memiliki peran dalam pengawasan program. Penentuan narasumber dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, pengalaman dalam pengelolaan atau pemanfaatan dana, serta kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Sisay & Mulaw, 2024).

Selanjutnya, peneliti menghubungi narasumber untuk menjelaskan tujuan penelitian dan mengatur jadwal wawancara. Wawancara dilakukan secara tatap muka dalam periode pengumpulan data yang telah ditentukan. Proses wawancara dimulai dari pengelola UPK untuk menggali informasi mengenai dinamika kinerja keuangan lembaga, tren penyaluran dana, penyebab meningkatnya dana menganggur (*idle money*), serta faktor-faktor yang memengaruhi penurunan jumlah kelompok aktif. Wawancara dengan kader SPP difokuskan pada identifikasi perubahan partisipasi anggota, keberlanjutan kelompok, efektivitas pendampingan, serta indikasi kejenuhan pasar (*market saturation*) dalam jenis usaha yang dijalankan anggota. Sementara itu, wawancara dengan pelaku usaha perempuan diarahkan untuk memahami pengalaman mereka terkait manfaat pinjaman, keberlanjutan usaha, persaingan pasar lokal, serta alasan melanjutkan atau tidak melanjutkan siklus pinjaman.

Pendekatan narasumber *multi-level* ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif serta meminimalkan bias persepsi tunggal. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya merepresentasikan perspektif kelembagaan, tetapi juga pengalaman empiris di tingkat akar rumput.

Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk menjawab tiga isu utama, yaitu penurunan jumlah kelompok aktif, indikasi kejenuhan pasar (*market saturation*), dan keberlanjutan dana bergulir SPP pasca-transisi PNPM Mandiri. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pengelola UPK, kader SPP, dan pelaku usaha perempuan. Pertanyaan kepada UPK difokuskan pada tren penyaluran dana, peningkatan dana menganggur (*idle money*), serta faktor penyebab penurunan kelompok aktif. Wawancara dengan kader dan pelaku usaha diarahkan pada dinamika partisipasi kelompok, efektivitas pendampingan, tingkat persaingan usaha lokal, serta alasan keberlanjutan atau penghentian siklus pinjaman.

Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas usaha dan praktik pengelolaan kelompok dalam proses musyawarah maupun angsuran. Dokumentasi digunakan untuk menelaah laporan keuangan UPK, data perkembangan jumlah kelompok dan anggota, serta kondisi dana menganggur. Data sekunder yang diperoleh dari Laporan UPK BKAD Mayong tahun 2024–2025 disajikan dalam tabel untuk memberikan gambaran empiris mengenai kontradiksi antara peningkatan kinerja finansial dan penurunan partisipasi kelompok.

Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan narasumber dan ditranskripsikan secara lengkap guna menjaga akurasi data. Identitas informan disamarkan menggunakan kode tertentu sebagai bagian dari penerapan prinsip etika penelitian kualitatif. Kombinasi data primer dan sekunder ini memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas SPP dalam dimensi finansial maupun sosial. Guna memperjelas komposisi data lapangan, profil para informan yang terlibat dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Narasumber

Narasumber	Kategori Informan	Jabatan / Jenis Usaha	Lokasi
Ibu A	Pelaku Usaha	UMKM	Desa Kauman
Ibu B	Pelaku Usaha	UMKM	Desa Mayong Lor
Ibu C	Pelaku Usaha	UMKM	Desa Tiga Juru
Ibu D	Pelaku Usaha	UMKM	Desa Sengon Bugel
Bapak A	Internal UPK	UPK BKAD Mayong	Kecamatan Mayong
Bapak B	Internal UPK	UPK BKAD Mayong	Kecamatan Mayong
Ibu E	Internal UPK	UPK BKAD Mayong	Kecamatan Mayong
Ibu F	Internal UPK	UPK BKAD Mayong	Kecamatan Mayong
Ibu G	Kader SPP	Kader pendamping kelompok	Desa Plemkerep
Ibu H	Kader SPP	Kader pendamping kelompok	Desa Mayong Lor
Ibu I	Kader SPP	Kader kelompok SPP	Desa Datar
Ibu J	Aparatur Desa	Aparatur Pemerintah Desa	Desa Datar

Data sekunder diperoleh dari laporan resmi UPK, dokumen kebijakan PNPM-Mandiri, serta publikasi statistik daerah yang relevan. Data sekunder berfungsi untuk memberikan konteks struktural serta memperkuat interpretasi terhadap temuan lapangan. Gambaran

mengenai fluktuasi finansial dan kondisi kelembagaan pada lokasi penelitian dipaparkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Posisi Keuangan Kelompok UPK PNPM-Mandiri Tahun 2024–2025

Indikator	2024	2025	Perubahan
Total Aset	Rp14,28 M	Rp15,50 M	+8,57%
Surplus	Rp428 Jt	Rp454 Jt	+6,07%
<i>Idle Money</i>	Rp104 Jt	Rp826 Jt	↑ signifikan
Jumlah Kelompok	326	292	↓
Jumlah Anggota	3.589	3.178	↓

Tabel 2 menyajikan potret kontradiktif antara angka pertumbuhan dan fakta di lapangan. Di satu sisi, indikator ekonomi makro menunjukkan tren positif yang mana Total Aset dan Surplus terus merangkak naik masing-masing sebesar 8,57% dan 6,07%, mencerminkan ketangguhan finansial lembaga. Namun, di balik angka-angka positif tersebut, tersimpan sebuah ironi pada dimensi sosial. Poin krusial dalam data ini adalah penurunan partisipasi yang nyata, di mana jumlah kelompok dan anggota justru menyusut. Fenomena ini semakin dipertegas dengan lonjakan *Idle Money* (dana menganggur) yang tumbuh signifikan.

Triangulasi dan Keabsahan Data

Triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian melalui pemeriksaan silang antara sumber dan antar-metode (Miles et al., 2018). Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pengelola UPK, kader pendamping, pelaku usaha perempuan, dan aparatur desa. Triangulasi dilakukan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada periode yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

Sebagai contoh, temuan mengenai penurunan jumlah kelompok aktif awalnya diperoleh dari laporan keuangan dan data administratif UPK. Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi melalui wawancara dengan pengelola UPK yang menjelaskan adanya penurunan pengajuan proposal baru. Selanjutnya, kader SPP menyatakan bahwa sebagian anggota tidak melanjutkan pinjaman karena jenis usaha yang homogen dan persaingan pasar lokal yang meningkat. Pernyataan ini diperkuat oleh pengalaman pelaku usaha yang mengaku ragu mengambil pinjaman ulang karena keuntungan usaha tidak berkembang signifikan. Proses perbandingan tersebut memastikan bahwa fenomena penurunan kelompok tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang saling berkaitan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif (Miles et al., 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan mengodekan hasil wawancara berdasarkan tiga isu utama penelitian, yaitu penurunan kelompok aktif, indikasi kejenuhan pasar (*market saturation*), dan keberlanjutan dana bergulir. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks tematik dan tabel perkembangan data sekunder untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antar-temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data, di mana temuan awal terus diverifikasi kembali melalui wawancara lanjutan dan perbandingan dengan data dokumentasi hingga diperoleh interpretasi yang konsisten dan terkonfirmasi. Melalui

penerapan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel, konfirmabel, dan mampu merepresentasikan kondisi empiris secara objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontradiksi Kinerja Keuangan dan Penurunan Kelompok Aktif

Berdasarkan data sekunder Laporan UPK BKAD Mayong tahun 2024–2025, secara finansial Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) menunjukkan kinerja yang stabil bahkan cenderung meningkat. Aset lembaga dan surplus operasional mengalami pertumbuhan, serta tingkat pengembalian angsuran relatif lancar. Kondisi ini mencerminkan keberlanjutan finansial lembaga dalam mengelola dana bergulir. Namun demikian, pada periode yang sama terjadi penurunan jumlah kelompok aktif serta peningkatan dana menganggur (*idle money*). Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi antara stabilitas keuangan lembaga dan dinamika partisipasi sosial kelompok perempuan.

Data menunjukkan bahwa meskipun jumlah total dana tersedia meningkat, permintaan pinjaman baru tidak tumbuh secara proporsional. Beberapa kelompok lama tidak melanjutkan siklus pinjaman, sementara pembentukan kelompok baru mengalami perlambatan. Hal ini berdampak pada akumulasi dana yang tidak tersalurkan secara optimal. Dalam konteks intermediasi keuangan, kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya fungsi penyaluran dana meskipun kapasitas pembiayaan tetap tersedia. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengelola UPK BKAD Mayong yang menyatakan:

“Secara keuangan lembaga tetap aman, angsuran berjalan lancar. Tetapi pengajuan baru memang tidak sebanyak dulu, dan ada beberapa kelompok yang memilih tidak melanjutkan pinjaman.” (Bapak A, 2025)

Keterangan tersebut sejalan dengan pernyataan kader SPP yang menjelaskan bahwa sebagian anggota merasa manfaat pinjaman tidak lagi sebesar pada periode awal keikutsertaan mereka

“Dulu banyak yang semangat karena baru mulai usaha. Sekarang ada yang merasa usahanya tidak berkembang banyak, jadi tidak lanjut pinjam.” (Ibu G, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penurunan kelompok aktif tidak semata-mata disebabkan oleh masalah administratif atau kelemahan tata kelola, melainkan juga oleh dinamika ekonomi usaha anggota. Dengan kata lain, keberlanjutan finansial lembaga tidak secara otomatis berbanding lurus dengan keberlanjutan partisipasi kelompok. Dalam perspektif efektivitas program, kondisi ini menegaskan bahwa indikator keberhasilan tidak dapat hanya diukur dari peningkatan aset dan surplus operasional, tetapi juga dari kemampuan program mempertahankan dan memperluas partisipasi kelompok perempuan secara berkelanjutan. Kontradiksi antara kinerja keuangan yang positif dan menurunnya jumlah kelompok aktif menjadi titik krusial yang menjelaskan adanya kesenjangan antara keberlanjutan kelembagaan dan keberlanjutan sosial Program SPP di Kecamatan Mayong.

Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang terdiri dari pelaku usaha UMKM, UPK BKAD Mayong, kader, dan aparat desa, diperoleh temuan bahwa pelaksanaan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Mayong berjalan melalui tahapan

sosialisasi partisipatif, pembiayaan berbasis kelompok, verifikasi berjenjang, serta pendampingan intensif, sistematis dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi perempuan.

Implementasi Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, menunjukkan karakteristik inklusi keuangan berbasis komunitas yang terstruktur dan kontekstual terhadap dinamika sosial pedesaan, sebagai berikut:

a) Sosialisasi Program SPP

Sosialisasi merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan Program SPP yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan, mengenai tujuan, aturan, dan mekanisme program. Hal ini disampaikan oleh Bapak A, selaku Staff Internal UPK BKAD Mayong:

“Proses dimulai dari tahap sosialisasi, kemudian pengajuan melalui musyawarah kelompok yang dihadiri oleh seluruh anggota”.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui berbagai media agar informasi program dapat menjangkau masyarakat secara luas. Bapak B, selaku Staff Internal UPK BKAD Mayong, menjelaskan:

“Pelaksanaan program SPP diawali dengan kegiatan sosialisasi. Media sosialisasinya ada kunjungan langsung ke RT, RW, kelompok pengajian, posyandu, juga melalui baliho dan radio desa”.

Selain itu, sosialisasi juga berfungsi sebagai sarana penjelasan mendalam terkait hak dan kewajiban kelompok peminjam. Hal ini ditegaskan oleh Ibu E, selaku Staff Internal UPK BKAD Mayong, yang menyampaikan:

“Sosialisasi ini berisi penjelasan seputar program SPP, mulai dari tujuan, aturan, hak dan kewajiban kelompok, sampai mekanisme pengajuan pinjaman”.

Dalam perspektif teori microfinance Muhammad Yunus, tahap sosialisasi memiliki fungsi sebagai social preparation, yaitu membangun pemahaman kolektif, disiplin kelompok, dan komitmen moral sebelum kredit diberikan (Yunus & Jolis, 1998). Yunus menegaskan bahwa keberhasilan *microfinance* bukan semata ditentukan oleh penyaluran dana, melainkan oleh kesiapan sosial dan solidaritas kelompok.

b) Mekanisme Pengajuan dan Verifikasi Pinjaman

Setelah sosialisasi, kelompok yang berminat diwajibkan mengajukan pinjaman secara berkelompok melalui musyawarah dan penyusunan proposal. Proposal yang diajukan kemudian melalui proses verifikasi ber lapis. Bapak A menjelaskan:

“Proposal yang telah disetujui diajukan ke UPK di tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan”.

Ibu E menambahkan:

“Kami melihat apakah anggota kelompok tersebut pernah menunggak, telat membayar, atau melakukan penyimpanan dana. Kalau semuanya dinyatakan layak, maka proposal siap diverifikasi”.

Sementara itu, Bapak B menegaskan orientasi produktif program:

“UPK sejak awal memang memilih kelompok-kelompok yang sudah punya UMKM, supaya dana pinjaman dipakai untuk hal yang produktif, bukan untuk konsumsi”.

Mekanisme ini mencerminkan prinsip group lending dalam model Yunus, di mana tanggung jawab kolektif menggantikan jaminan fisik (collateral). Yunus memperkenalkan konsep social collateral, yaitu jaminan berbasis kepercayaan dan kontrol sosial antaranggota kelompok. Model ini terbukti mampu menekan risiko moral hazard dan meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman (Armendáriz & Morduch, 2010). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Sisay & Mulaw (2024) yang menyatakan bahwa sistem pengajuan pinjaman berbasis kelompok efektif meningkatkan ketepatan sasaran serta memperkuat akuntabilitas internal melalui pengawasan horizontal.

c) Persyaratan dan Kemudahan Akses Pembiayaan

Temuan menunjukkan bahwa persyaratan administrasi Program SPP tergolong sederhana. Bapak A menjelaskan:

“Berkas pribadi yang dibutuhkan hanya KTP dan Kartu Keluarga (KK)”.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak B:

“Untuk persyaratan administrasi sendiri relatif mudah, cukup fotokopi KK dan KTP, tapi tetap selektif secara sosial”.

Selain itu, tidak diwajibkannya agunan untuk pinjaman tertentu menjadi karakteristik penting program ini. Bapak A menyampaikan:

“Untuk pinjaman hingga Rp15 juta tidak diperlukan agunan”

Ketiadaan agunan ini merupakan ciri khas *microfinance* ala Yunus, yang secara eksplisit menolak sistem jaminan konvensional karena dianggap mengeksklusi kelompok miskin dan perempuan. Prinsip ini memperluas financial inclusion, terutama bagi perempuan yang secara struktural sering tidak memiliki aset formal atas nama pribadi. Namun demikian, kemudahan tersebut tetap diimbangi dengan selektivitas sosial dan verifikasi berlapis, sehingga menciptakan keseimbangan antara aksesibilitas dan *prudential management*.

d) Proses Pencairan Dana Berbasis Desa

Pencairan dana Program SPP dilakukan setelah proposal disetujui dalam rapat pendanaan UPK dan dilaksanakan secara berbasis desa. Bapak B, selaku Staff Internal UPK BKAD Mayong menjelaskan:

“Pencairan dana dilakukan di desa, biasanya di rumah ketua kelompok”.

Bapak A menambahkan:

“Untuk kelompok lama, pencairan dapat dilakukan dalam waktu 1-2 hari setelah angsuran terakhir dihunasi.”

Model pencairan berbasis desa ini mencerminkan prinsip Yunus tentang *proximity-based service delivery*, di mana layanan keuangan harus mendekat ke masyarakat, bukan sebaliknya. Kedekatan geografis meningkatkan aksesibilitas, menekan biaya transaksi, dan memperkuat hubungan sosial antara pengelola dan peminjam. Efisiensi pencairan, khususnya bagi kelompok lama, juga menunjukkan adanya *trust accumulation*, yaitu akumulasi kepercayaan institusional sebagai hasil dari disiplin pembayaran sebelumnya.

e) Mekanisme Seleksi dan Pengawasan Program SPP

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf UPK, sekretaris UPK, Ketua UPK Kecamatan Mayong, serta kader SPP dan aparatur desa, diperoleh temuan bahwa mekanisme seleksi dan pengawasan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dilaksanakan secara ketat, berjenjang, dan berkelanjutan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa dana SPP disalurkan kepada kelompok yang layak serta digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Penggunaan dana SPP diarahkan secara khusus untuk kegiatan produktif. Selain seleksi awal, pengendalian dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan. Bapak B, selaku Staff Internal UPK BKAD Mayong, menyampaikan:

“Dalam kegiatan sosialisasi juga sudah diarahkan bahwa sasaran utama SPP itu ibu-ibu yang punya usaha, jadi penggunaan dana bisa lebih terkontrol dan tepat sasaran”.

Dari sisi kader, Ibu H selaku Kader SPP Desa Mayong Lor menambahkan bahwa pengendalian juga dilakukan melalui pendekatan persuasif:

“Kalau ada anggota yang pakai dana tidak sesuai, biasanya kami ingatkan dan arahkan lagi supaya modal tetap dipakai untuk usaha”.

Lebih lanjut, pendekatan kelompok dalam SPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko kredit, tetapi juga sebagai sarana penguatan modal sosial perempuan. Interaksi rutin, pendampingan kader, dan mekanisme musyawarah memperkuat solidaritas ekonomi serta meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam mengelola pinjaman. Dalam teori microfinance Yunus, pengawasan berbasis komunitas ini lebih efektif dibandingkan pengawasan birokratis semata, karena mengandalkan norma sosial dan reputasi kolektif.

f) Pendampingan dan Peran Kelembagaan dalam Program SPP

Berdasarkan hasil wawancara dengan kader SPP, aparatur desa, dan Ketua UPK Kecamatan Mayong, diperoleh temuan bahwa pendampingan dan peran kelembagaan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Pendampingan dilakukan secara intensif oleh kader sejak tahap awal pengajuan hingga proses angsuran, serta diperkuat melalui sinergi antara kader, UPK, dan pemerintah desa. Pendampingan oleh kader SPP dilakukan sejak tahap awal, mulai dari pencarian calon peminjam, pembentukan kelompok, penyusunan proposal, hingga pendampingan selama masa angsuran. Hal ini disampaikan oleh Ibu G selaku Kader SPP, menyatakan:

“Tugas saya mendampingi pengurus dan anggota SPP dari tahap awal, seperti mencari calon peminjam, membantu pembentukan kelompok, menyusun proposal, melengkapi administrasi, sampai mendampingi pertemuan kelompok dan angsuran”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu H selaku Kader SPP Desa Mayong Lor yang menyampaikan bahwa pendampingan dilakukan agar proses pinjaman berjalan tertib dan tepat sasaran:

“Dari awal kami dampingi supaya pengajuan tidak asal. Usaha dicek dulu, proposal dibantu, dan selama angsuran juga tetap dipantau”.

Pendampingan yang berkelanjutan tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pinjaman sekaligus meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari. Kader juga

berperan sebagai fasilitator dalam pembentukan kelompok dan pengelolaan administrasi kelompok. Ibu H selaku Kader SPP Desa Mayong Lor menjelaskan:

“Kami mendampingi pembentukan kelompok, membantu pembuatan proposal pinjaman, sampai mendampingi proses verifikasi usaha. Jadi pengajuan tidak asal, semuanya dicek sejak awal”.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu G selaku Kader SPP Desa Mayong Lor yang menekankan pentingnya pendampingan administrasi:

“Banyak anggota yang belum terbiasa mencatat keuangan, jadi kami dampingi supaya lebih tertib dan tahu kewajiban angsuran tiap bulan”.

Bantuan administrasi ini mencakup pendampingan pencatatan keuangan sederhana agar anggota lebih tertib dan bertanggung jawab dalam mengelola pinjaman.

Pendampingan ini mencerminkan pendekatan *credit plus* atau *beyond credit approach* dalam *microfinance*, yaitu bahwa pemberdayaan tidak cukup hanya dengan memberikan kredit, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas dan literasi keuangan.

Peran kader sebagai perpanjangan tangan UPK di tingkat desa memperkuat efektivitas pendampingan dan pengawasan program. Dengan demikian, keterlibatan kader menjadi faktor penting dalam memastikan Program SPP berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Indikasi Kejenuhan Pasar (*Market Saturation*)

Hasil wawancara dengan pelaku usaha perempuan dan kader SPP menunjukkan adanya kecenderungan homogenitas jenis usaha di antara anggota kelompok. Sebagian besar anggota menjalankan usaha pada sektor yang serupa, seperti warung sembako, penjualan makanan ringan, jasa laundry rumahan, serta perdagangan hasil pertanian skala kecil. Pola usaha yang relatif seragam ini menyebabkan persaingan harga di tingkat lokal menjadi semakin ketat, terutama karena pasar yang dilayani masih bersifat terbatas dan berbasis konsumsi masyarakat desa. Salah satu pelaku usaha menyampaikan:

“Sekarang banyak yang jualannya hampir sama. Kalau pinjam lagi tapi pembelinya itu-itu saja, takutnya tidak balik modal.” (Ibu A, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap keterbatasan daya serap pasar. Kader SPP juga mengakui bahwa dalam beberapa desa, anggota kelompok menjalankan usaha dengan komoditas yang serupa sehingga ruang ekspansi menjadi sempit.

“Mayoritas ibu-ibu jualan sembako atau makanan kecil. Kalau terlalu banyak yang sama, pembelinya terbagi.” (Ibu B, 2025)

Kondisi ini mengindikasikan terjadinya *market saturation*, yaitu situasi ketika kapasitas pasar lokal tidak lagi mampu menyerap tambahan produksi atau ekspansi usaha secara signifikan. Dalam konteks tersebut, tambahan modal tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan keuntungan. Beberapa anggota bahkan memilih untuk tidak melanjutkan pinjaman karena margin usaha dinilai stagnan dan risiko kerugian meningkat akibat persaingan harga.

Fenomena kejenuhan pasar ini menjelaskan bahwa penurunan jumlah kelompok aktif tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kelembagaan atau mekanisme program, tetapi juga oleh struktur ekonomi lokal yang terbatas. Ketika variasi usaha tidak berkembang dan akses pasar tidak meluas, efektivitas program pembiayaan mikro menjadi bergantung pada kemampuan anggota untuk berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha.

Dengan demikian, dalam menilai efektivitas Program SPP, perlu dipertimbangkan faktor eksternal berupa dinamika pasar lokal. Program yang berhasil dalam menyediakan akses kredit belum tentu mampu mendorong pertumbuhan usaha apabila tidak diimbangi dengan strategi pengembangan pasar, pelatihan kewirausahaan, dan diversifikasi produk. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan partisipasi kelompok perempuan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kapasitas pasar dalam menyerap aktivitas ekonomi yang dihasilkan.

Keberlanjutan Dana SPP Pasca-PNPM Mandiri

Meskipun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri telah berakhir secara nasional, dana bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Mayong tetap dikelola oleh UPK BKAD Mayong sebagai lembaga eks-PNPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan, fungsi intermediasi, seleksi, dan pengawasan dana masih berjalan relatif stabil. Hal ini tercermin dari mekanisme seleksi berjenjang, pengawasan berbasis kelompok, serta kelancaran angsuran yang tetap terjaga.

Proses seleksi kelompok penerima pinjaman dilakukan melalui tahapan sosialisasi, musyawarah kelompok, verifikasi administratif, verifikasi lapangan, hingga penetapan dalam rapat pendanaan. Kelompok yang mengajukan pinjaman diwajibkan memiliki usaha aktif serta riwayat pembayaran yang baik. Pengelola UPK menyatakan:

“Kami tetap melakukan verifikasi administrasi dan lapangan. Kelompok harus benar-benar punya usaha dan riwayat pembayaran yang baik.” (Bapak B, 2025)

Proses ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential lending*) tetap diterapkan meskipun program tidak lagi berada dalam kerangka PNPM secara formal. Selektivitas tersebut berfungsi menjaga kualitas portofolio pinjaman dan meminimalkan risiko kredit bermasalah. Untuk memperjelas mekanisme yang mendukung keberlanjutan dana, berikut ringkasan tahapan pengelolaan SPP di Kecamatan Mayong:

Tabel 3 Mekanisme Pengelolaan dan Pengawasan Dana SPP

Aspek	Praktik di Kecamatan Mayong	Dampak terhadap Keberlanjutan
Seleksi	Verifikasi administratif dan lapangan berjenjang	Risiko kredit terkendali
Penyaluran	Pencairan berbasis desa melalui kelompok	Akses tetap inklusif
Pengawasan	Monitoring kader & kontrol sosial kelompok	Angsuran relatif lancar
Evaluasi	Rapat rutin dan pengecekan riwayat pembayaran	Stabilitas portofolio terjaga

Tabel 3 menyajikan alur kerja bagi keberlangsungan dana SPP di tengah perubahan struktur organisasi. Poin penting yang tergambar bukan sekadar soal birokrasi, melainkan tentang bagaimana kepercayaan masyarakat dirawat melalui verifikasi yang jujur dan pengawasan berbasis kekeluargaan. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa stabilitas dana bukan hanya hasil dari hitungan angka di atas kertas, melainkan buah dari keterlibatan aktif para kader dan kontrol sosial yang kuat antar anggota kelompok. Melalui rapat rutin dan monitoring yang humanis, sistem ini membuktikan bahwa inklusivitas tetap bisa berjalan

selaras dengan kedisiplinan finansial, menjaga agar modal yang ada tetap bermanfaat bagi generasi pelaku usaha berikutnya.

Selain seleksi awal, keberlanjutan dana juga ditopang oleh mekanisme pengawasan berbasis komunitas. Kader melakukan pendampingan rutin dan anggota kelompok saling mengingatkan terkait kewajiban angsuran. Seorang kader menyampaikan:

“Kalau ada yang mulai telat bayar, biasanya langsung diingatkan dalam pertemuan kelompok.” (Ibu G, 2025)

Pengelola UPK juga menegaskan bahwa secara umum tingkat pengembalian pinjaman masih dalam kategori aman:

“Angsuran tetap jalan dan relatif lancar. Kredit macet rendah.” (Ibu F, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab kolektif dan peer monitoring masih berfungsi efektif dalam menjaga disiplin pembayaran. Dengan demikian, secara finansial dana SPP berada dalam kondisi stabil dan mampu mempertahankan keberlanjutan kelembagaan.

Namun demikian, keberlanjutan finansial tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi penyaluran dana. Peningkatan dana menganggur (*idle money*) akibat menurunnya pengajuan pinjaman baru menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada pengelolaan internal, melainkan pada dinamika partisipasi dan permintaan kredit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan pasca-PNPM lebih kuat pada dimensi stabilitas administrasi dan keuangan dibanding pada ekspansi sosial kelompok perempuan.

Secara keseluruhan, keberlanjutan dana SPP di Kecamatan Mayong pasca-PNPM Mandiri dapat dikatakan terjaga dalam aspek kelembagaan dan keuangan, namun menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dana dan perluasan partisipasi ekonomi perempuan. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh kelancaran angsuran, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi lokal.

Dampak Program terhadap UMKM dan Agency Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah kelompok aktif, bagi anggota yang masih berpartisipasi, Program SPP memberikan dampak nyata terhadap penguatan usaha mikro dan peningkatan kapasitas ekonomi perempuan. Dampak tersebut terutama terlihat pada peningkatan modal kerja, stabilitas operasional usaha, serta perubahan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga.

a) Peningkatan Modal dan Stabilitas Usaha

Sebagian besar informan menyatakan bahwa dana pinjaman SPP digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk pembelian stok barang, bahan baku, dan perlengkapan produksi. Tambahan modal ini memungkinkan usaha berjalan lebih stabil dan tidak lagi bergantung pada perputaran kas harian yang terbatas. Salah satu pelaku usaha menyampaikan:

“Biasanya saya pakai buat nambah stok barang dagangan seperti kacang dan bawang. Sekarang barang selalu tersedia dan tidak kehabisan.” (Ibu A, 2025)

Informan lain menjelaskan:

“Kalau ada pesanan, saya tidak bingung lagi soal modal beli bahan. Jadi usaha lebih lancar.” (Ibu B, 2025)

Ketersediaan modal kerja (*working capital*) yang lebih memadai berdampak pada peningkatan volume penjualan dan kontinuitas produksi. Dalam perspektif ekonomi usaha mikro, stabilitas pasokan merupakan faktor penting dalam menjaga loyalitas pelanggan dan memperluas jaringan pasar. Dengan demikian, akses pembiayaan SPP berkontribusi pada penguatan struktur modal usaha dan mengurangi risiko stagnasi operasional.

Namun demikian, peningkatan kapasitas usaha tersebut tetap bergantung pada kondisi pasar lokal. Pada usaha dengan tingkat persaingan tinggi, tambahan modal tidak selalu menghasilkan ekspansi signifikan, melainkan lebih berfungsi menjaga stabilitas usaha yang telah ada.

b) Kemandirian Ekonomi dan Perubahan Peran Perempuan

Selain dampak ekonomi pada usaha, Program SPP juga memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap kemandirian perempuan. Informan menyatakan bahwa memiliki penghasilan sendiri meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi ketergantungan finansial terhadap suami.

Salah satu peserta menyampaikan:

“Sekarang saya merasa lebih mandiri, tidak hanya mengandalkan penghasilan suami.

Bisa ikut membantu ekonomi keluarga.” (Ibu C, 2025)

Kemandirian ekonomi ini memperluas ruang pengambilan keputusan perempuan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, perempuan menjadi lebih aktif dalam menentukan alokasi pengeluaran, pendidikan anak, serta keputusan investasi usaha. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan *economic agency*, yaitu kemampuan perempuan untuk mengakses, mengontrol, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi secara mandiri.

c) Peningkatan Posisi Tawar dalam Rumah Tangga

Program SPP juga berdampak pada peningkatan posisi tawar perempuan dalam relasi keluarga. Dengan kontribusi pendapatan yang lebih nyata, perempuan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dalam diskusi ekonomi keluarga. Seorang informan menyampaikan:

“Kalau dulu saya hanya ikut saja keputusan suami. Sekarang karena saya juga punya penghasilan, jadi bisa ikut menentukan.” (Ibu D, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan tidak hanya menghasilkan dampak finansial, tetapi juga transformasi peran sosial perempuan.

d) Sintesis Dampak Ekonomi dan Sosial

Untuk merangkum temuan dampak program, Tabel 4 menyajikan ringkasan dimensi perubahan yang dialami peserta aktif. Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa efektivitas

Tabel 4. Dampak Program SPP terhadap UMKM dan *Agency* Perempuan

Dimensi Dampak		Temuan Empiris		Implikasi
Modal Usaha	Penambahan stok & bahan baku	Stabilitas	meningkat	operasional
Produksi & Penjualan	Usaha lebih lancar, pesanan terpenuhi	Kepercayaan	meningkat	pelanggan
Kemandirian Ekonomi	Memiliki penghasilan sendiri	Ketergantungan	berkurang	finansial
Posisi Tawar	Lebih aktif dalam keputusan keluarga	Peningkatan	<i>economic agency</i>	

Program SPP pada level mikro masih terlihat kuat dalam dimensi pemberdayaan individu dan keberlanjutan usaha anggota aktif. Namun demikian, dampak ini bersifat selektif dan lebih dirasakan oleh kelompok yang tetap bertahan dalam siklus pinjaman.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini secara khusus mengkaji tiga isu utama: (1) penyebab penurunan jumlah kelompok aktif dan anggota SPP di Kecamatan Mayong meskipun kinerja keuangan UPK menunjukkan tren positif, (2) indikasi kejenuhan pasar (*market saturation*) yang memengaruhi penurunan partisipasi kelompok, dan (3) kontribusi dana SPP terhadap ekonomi perempuan pasca-transisi PNPM Mandiri menuju skema Dana Desa. Terhadap ketiga isu tersebut, penelitian ini menemukan bahwa penurunan jumlah kelompok aktif tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan tata kelola atau mekanisme program, melainkan didorong oleh menurunnya permintaan pinjaman baru akibat stagnannya perkembangan usaha anggota, yang tercermin pula dari lonjakan *idle money* secara signifikan; fenomena kejenuhan pasar terbukti nyata terjadi akibat homogenitas jenis usaha dan keterbatasan daya serap pasar lokal sehingga tambahan modal tidak lagi secara otomatis menghasilkan ekspansi usaha yang berarti, melainkan hanya menjaga stabilitas operasional yang sudah ada; dan secara kelembagaan, keberlanjutan dana bergulir SPP pasca-PNPM Mandiri tetap terjaga melalui mekanisme seleksi berjenjang, verifikasi lapangan, pengawasan berbasis komunitas, serta pendampingan intensif oleh kader yang menjaga tingkat pengembalian angsuran tetap relatif lancar, meskipun keberlanjutan finansial tersebut belum diimbangi dengan perluasan partisipasi sosial kelompok perempuan secara struktural.

Pada dimensi individu, bagi anggota yang masih aktif berpartisipasi, program ini terbukti memberikan dampak positif berupa peningkatan modal kerja, stabilitas usaha, kemandirian ekonomi, serta penguatan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Secara keseluruhan, efektivitas Program SPP di Kecamatan Mayong dapat dikatakan kuat dalam menjaga stabilitas kelembagaan dan keberlanjutan dana bergulir, namun menghadapi tantangan struktural dalam mempertahankan ekspansi sosial dan optimalisasi penyaluran dana akibat dinamika pasar lokal yang terbatas, sehingga diperlukan strategi lanjutan berupa diversifikasi usaha, peningkatan literasi kewirausahaan, dan perluasan akses pasar agar program pemberdayaan ekonomi perempuan ini dapat terus relevan dan berdampak secara berkelanjutan.

Saran

Bagi UPK BKAD Mayong dan pemerintah desa perlu dilakukan strategi diversifikasi usaha dan perluasan akses pasar bagi anggota SPP, misalnya melalui pelatihan inovasi produk, pemasaran digital, atau kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko kejenuhan pasar dan meningkatkan daya serap dana bergulir. Bagi pelaksana program penguatan pendampingan sebaiknya tidak hanya berfokus pada administrasi dan pengawasan angsuran, tetapi juga pada pengembangan kapasitas kewirausahaan, manajemen keuangan, dan perencanaan usaha jangka menengah agar keberlanjutan usaha anggota lebih terjamin. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur secara lebih terstruktur hubungan

antara akses pembiayaan, pertumbuhan usaha, dan perubahan posisi tawar perempuan, serta membandingkan efektivitas SPP antarwilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 22–53. <https://doi.org/10.1257/app.20130533>
- Dachi, A., & Kasztelnik, K. (2024). Building Bridges: Implementing Governance for Sustainability in the Microfinance Banks of Developing Countries. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 8(3), 1–16. [https://doi.org/10.61093/fmir.8\(3\).1-16.2024](https://doi.org/10.61093/fmir.8(3).1-16.2024)
- Damayanti, A., Bangun, U., & Athar, G. A. (2023). Peranan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM) Mandiri untuk meningkatkan usaha mikro kecil (UMK) dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun Adi Mulio Hilir Desa Emplasemen Kwala Mencirim. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(3), 478–484. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/111>
- Desiyani, R. E., & Rahmawati, M. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Kewirausahaan Perempuan Studi Pada PT. PNM Unit Serang. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(3), 131–141. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i3.43>
- Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation Matters: A Review of Research on the Influence of Implementation on Program Outcomes and the Factors Affecting Implementation. *American Journal of Community Psychology*, 41(3–4), 327–350. <https://doi.org/10.1007/s10464-008-9165-0>
- Ghatak, M., & Guinnane, T. W. (1999). The economics of lending with joint liability: theory and practice. *Journal of Development Economics*, 60(1), 195–228. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(99\)00041-3](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(99)00041-3)
- Herdiana, D. (2022). Kemiskinan, Kesenjangan Sosial dan Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2(3), 172–180. <https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>
- Jasmi, Z. S., & Hassan, N. (2024). Inside Microfinance Matrix: Microfinance Institutions' Characteristics and Women Credit Access. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6), 110–120. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16977>
- Maulana, B. H., Rohman, A., & Prabowo, T. (2022). Doing qualitative research of phenomenology in accounting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 26(1), 1–10. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1890>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Mishra, Dr. A., Rathore, Dr. R. S., Pandey, Mr. A., Singh, Ms. J., & Katiyar, Mr. M. (2024). Evaluating the role of microfinance institutions in supporting financial inclusion and

- economic development. *Educational Administration Theory and Practices*.
<https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.4956>
- Mustanir, A., & Faried, A. D. (2023). *Pengertian dan konsep pemberdayaan masyarakat*. CV. Tohar Media.
- Nurhayati, N. (2016). Grameen Bank Project “Social Business” Muhammad Yunus. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 2(1), 31–48.
<https://doi.org/10.21070/jbmp.v2i1.909>
- Pattnaik, D., Ray, S., & Hassan, M. K. (2024). Microfinance: A bibliometric exploration of the knowledge landscape. *Heliyon*, 10(10), e31216.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31216>
- Rangga, K. K. (2023). *Keefektifan kelompok dalam program pemberdayaan masyarakat*. CV. Anugerah Utama Raharja.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior (17th ed.)*. Pearson Education.
- Sinollah, S. (2019). Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Pnpm-Mp Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 31–38.
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i2.347>
- Siregar, P. C. A. (2025). Peran simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri dalam pengembangan UMKM perdesaan. *Journal of Economic Studies*, 1(1), 17–23.
<https://journal.feb.unila.ac.id/index.php/jes/article/view/154>
- Sisay, M. A., & Mulaw, A. A. (2024). Empowering rural women: key factors driving participation in livelihood credit programs in Gubalafto woreda, North Wollo, Ethiopia. *F1000Research*, 13, 1000. <https://doi.org/10.12688/f1000research.155113.1>
- Rana Nabila Ulya, & Eliza Noviriani. (2025). Kajian Kebermanfaatan PNM Mekaar Dalam Membantu Meningkatkan UMKM Bagi Pelaku Usaha Wanita. *Solusi*, 23(3), 374–388.
<https://doi.org/10.26623/slsi.v23i3.12091>
- Yunus, M. (2008). *Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism*. PublicAffairs.
- Yunus, M., & Jolis, A. (1998). *Banker to the poor: Micro-lending and the battle against world poverty*. PublicAffairs.